

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Selasa, 15 Oktober 2019



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Republika Halaman 3	Selasa, 15 Oktober 2019	Topangan Bank Dunia Rp 1,4T, Picu Gubernur Jabar Ngabret Atasi Citarum	Rencana dana bantuan dari Bank Dunia Rp 1,4 triliun akan cair pada Februari 2020.
2	Koran Tempo Halaman 3	Selasa, 15 Oktober 2019	BPJT Jamin Tol Susun Aman Bagi Kota Tua	Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menjamin dampak negative pembangunan jalan tol Harbour Road II rute Tanjong priok-Pluit bias diminimaliskan, termaksud resikonya bagi Kawasan kota tua, yang besar kemungkinannya dilalui jalan tol layang tersebut.
3	Koran Tempo Halaman 3	Selasa, 15 Oktober 2019	Proyek Jalan Tol harbour	Sosrobahu (lengan jalan layang dibangun sejajar dengan jalan dibawahnya, kemudian di putar 90 derajat sehingga pembangunannya tidak mengganggu arus lalu lintas di jalanan di bawahnya.
4	Media Indonesia Halaman 5	Selasa, 15 Oktober 2019	Pemindahan Ibu Kota Hapus Jawa Sentris	Menteri dalam negeri yang juga Pelaksana Tugas Menteri Hukum dan Ham Tjahjo Kumolo mengatakan, pemindahan ibu kota negara menjadi salah satu bentuk upaya pemerataan ekonomi dan menghapuskan istilah Jawa Sentris
5	Bisnis Indonesia Halaman 7(a,b)	Selasa, 15 Oktober 2019	Badan Usaha Lokal Minta Dilibatkan	Hal itu terkait dengan terpilihnya kabupaten penajam pasar utara dan kabupaten kutai kartanegara di provinsi Kalimantan Timur menjadi lokasi Ibu kota negara yang baru.
6	Republika Halaman 8	Selasa, 15 Oktober 2019	Rajin Blusukan seperti Presiden	Ketika Mau menerima atau ditunjuk sebagai pembantu presiden, jangan pakai visi-misi siapa pun kecuali visi-misi presiden
7	Bisnis Indonesia Halaman 9	Selasa, 15 Oktober 2019	DKI siapkan Tiga Program Perbaikan santasi	Pemprov DKI Jakarta dan PD Perusahaan Air Limbah DKI Jakarta (PD Pal Jaya) menyiapkan tiga program Perbaikan sanitasi bagi warga Ibu kota.
8	Republika Halaman 22	Selasa, 15 Oktober 2019	Bantuan Air dilakukan Sampai Hujan Turun	Pemerintah kabupaten (Pemkab) Bekasi, jawa barat, memastikan pendistribusian air bersih kepada warga berdampak kekeringan akan terus berjalan selama mereka masih membutuhkannya air. Sekretaris daerah (sekda) kabupaten, Bekasi, Uju mengaku telah menginstruksikan kepada badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, PDAM Tirta Bhagasasi.

Judul	Topangan Bank Dunia Rp 1,4T, Picu Gubernur Jabar Ngabret Atasi Citarum	Tanggal	Selasa, 15 Oktober 2019
Media	Republika Halaman 3		
Resume	Rencana dana bantuan dari Bank Dunia Rp 1,4 triliun akan cair pada Februari 2020.		

Topangan Bank Dunia Rp 1,4 T, Picu Gubernur Jabar Ngabret Atasi Citarum

JABAR JUARA



● Pengerukan Sungai Citarum.



● Pembangunan tanggul di Citarum.

Rencanakan, dana bantuan dari Bank Dunia Rp 1,4 triliun akan cair pada Februari 2020.

Uraian Sungai Citarum memang belum selesai. Fakta itu diakui juga oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Namun, selama hampir dua tahun perbaikan Sungai Citarum ini, sudah bi-

nyaman menunjukkan progres yang mengembirakan.

Bahkan, Emil, panggilan akrab Ridwan Kamil, semakin yakin perbaikan kawasan daerah aliran sungai (DAS) Citarum dari hulu sampai ke hilir akan maksimal pada 2020. Penumpang, yakni adanya dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,4 triliun yang akan cair pada Februari 2020.

"Alhamdulillah, selama ini mengalamai banyak kemajuan, walaupun dengan anggaran yang terkumpulnya. Kami harap bisa mengesekes ini pada 2020 dengan topangan dana Bank Dunia," ujar Emil dalam lokakarya 'Insulasi Das Tahun Percepatan Pengendalian DAS Citarum', pekan lalu.

Dikali Emil, dana yang akan dibayarkan itu tidak bisa diambil seluruhnya. Pemerintah pusat akan membebaskan anggaran sesuai dengan program yang telah disetujui oleh Pemerintah Jabar, dengan melihat sisi urgensinya.

Yang pasti, Emil yakin dana itu akan cair walaupun kemungkinan diteliti semua kebu-

tuhan. "Karena ini dana Negara, jadi sangat disiplin dan tidak dibalokan langsung," tambahnya.

Menurut Emil, tingkat kemungkinan serapannya bisa mencapai waktu dua tahun atau bahkan tiga tahun. Dirinya belum menetapkan nilai yang akan cair pada termin Februari 2020.

Untuk pencairan tahap pertama, pihaknya akan memprioritaskan penggunaan anggaran pada penanganan limbah domestik. Selain limbah dari industri, Citarum juga tercemar berat oleh limbah dari rumah tangga.

Tahun depan mulai penanganan sampah dengan berbagai teknologi. Dibutuhkan sampah (domestik) tidak masuk ke sungai dan berdampak pada pemukiman," tambahnya. Untuk menyelesaikan program ini, tutur Emil, banyak pihak

yang terlibat mulai dari TNI, Kepolisian, LSM, hingga kepala daerah.

Emil juga mengapresiasi, saat ini terdapat 200 kelompok yang harus bekerja sama dalam memperbaiki sungai Citarum. Pihaknya mengimbau agar seluruh pemangku kebijakan bisa berkolaborasi untuk menyelesaikan program besar demi kepentingan masyarakat.

Antaresa Depati Pradikitan dan Palatihan Maritan, Komando Kesatuan, Th Haera Kalanya memutarakan, meski berbagai upaya positif dijalankan, namun kinerjanya memang belum maksimal. "Saya selalu katakan, masa tidak mulai di tahun kedua ini sudah selesai," katanya.

Th Haera menyatakan, kinerja yang belum maksimal terletak pada koordinasi antar pemerintah daerah. Dirinya memulai pemaksimalan sejumlah permasalahan Sungai Citarum harus dilakukan lintas daerah, tidak boleh masing-masing.

Peran pemerintah daerah (Perda) ke depan, menurutnya, sangat penting. Karena, tegas dia, TNI yang selama ini menjadi garda terdepan program

Citarum Harum, kembali ke belakang dalam beberapa tahun ke depan. "TNI tidak akan selamanya mengawal ini. Walaupun tahun-tahun mendatang, tahun ketiga kita upayakan masih," katanya. Th Haera menambahkan bahwa program Cita-

rum mendapat dukungan sebesar Rp 1,4 triliun dari Bank Dunia.

Dana itu ditujukan untuk memanggulangi berbagai persoalan di Citarum. Pihaknya juga menyerap informasi dari berbagai petugas di lapangan, bahwa masyarakat cenderung lebih mengutamakan sampah yang telah dibayar ulang.

Tempat, tempat penampungan sampah yang lama di TPA Sorendi dan Lawigajah. "Hari ini (jokan lama) kami akan mengemas dari 10 program menjadi aman yang dipercepat," tambahnya.

Harapannya, papar dia, Presiden RI Jokowi meminta tugas tahun dua gubernur baru tahun, agar persoalan Citarum diselesaikan. Pihaknya optimis, melihat dari tahun ini, banyak hasil positif yang telah dicapai.

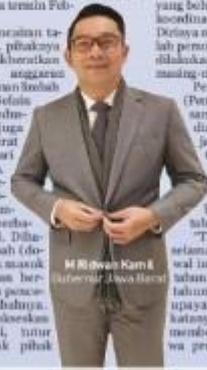
Untuk tahun ketiga (2020), kata dia, akan dilanjutkan semua program. Termasuk jalan kritis, pemukiman padat, dan pembangunan tempat pengolahan sampah pada 2020. "Sudah banyak juga permasalahan yang ditindak, yang P2T saja ada sekitar 70 titik 40, dan yang sudah jatuh victim ada dua," tandasnya. ■



● Damau Betanah



● Mengangkut sampah



Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat

Judul	BPJT Jamin Tol Susun Aman Bagi Kota Tua	Tanggal	Selasa, 15 Oktober 2019
Media	Koran Tempo Halaman 3		
Resume	Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menjamin dampak negative pembangunan jalan tol Harbour Road II rute Tanjung priok-Pluit bias diminimaliskan, termasuk resikonya bagi Kawasan kota tua, yang besar kemungkinannya dilalui jalan tol layang tersebut.		

BPJT Jamin Jalan Tol Susun Aman bagi Kota Tua

Pengelola Kota Tua menyarankan adanya analisis mengenai dampak proyek terhadap benda cagar budaya.

EDISI, 15 OKTOBER 2019



Jalan tol akses Tanjung Priok, Jakarta Utara. Jalan tol layang dengan rute Tanjung-Priok-Pluit merupakan sambungan dari jalan tol dalam kota

JAKARTA - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menjamin dampak negatif pembangunan jalan tol Harbour Road II rute Tanjung Priok-Pluit bisa diminimalkan, termasuk risikonya bagi kawasan Kota Tua, yang besar kemungkinan dilalui jalan tol layang tersebut.

Kepala BPJT Danang Parikesit mengatakan lembaganya-bersama pemilik dan kontraktor proyek-akan berkoordinasi dengan pemerintah DKI Jakarta serta pemerintah pusat untuk memastikan adanya desain terbaik jalan tol tersebut. "Tentu akan bekerja sama membuat desain terbaik dan mengurangi dampak negatif pembangunan," kata dia kepada Tempo, kemarin.

Menurut Danang, pembangunan jalan tol Harbour Road II diharapkan bisa mengurai pergerakan arus lalu lintas dari timur ke utara hingga ke barat Jakarta yang selama ini kerap padat dan macet. Setelah jalan tol itu beroperasi, kata dia, daya saing kawasan industri di Jakarta Utara juga diharapkan meningkat, baik pada level regional maupun internasional.

Jalan tol susun pelabuhan sepanjang 9,53 kilometer ini akan dibangun PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP), yang menggandeng PT Wijaya Karya Persero dan PT Girder Indonesia. Jalan tol ini diperkirakan melayang di atas sejumlah situs bersejarah di kawasan Kota Tua, seperti Gudang Timur dan Museum Bahari.

Kepala Unit Pengelola Kawasan Kota Tua, Novriadi Setio, mengatakan belum mengetahui perihal proyek tol yang akan melewati kawasan bersejarah di Jakarta Utara itu. Menurut dia, bila proyek itu memang akan melewati kawasan Kota Tua, perlu ada rekomendasi dari tim cagar budaya. "Kalau masuk teknis, mungkin tim cagar budaya akan dilibatkan," kata Novriadi.

Menurut Novriadi, pemilik dan pelaksana proyek harus memperhatikan pelestarian bangunan cagar budaya dan peninggalan bersejarah di area proyeknya. Sebelum pengerjaan proyek, perlu ada analisis mengenai dampak proyek terhadap benda cagar budaya. "Misalnya, titik konstruksi di lokasi A. Nah, harus ada penelitian arkeologisnya. Ketika aman, proyek bisa dilanjutkan. Kalau ada temuan, kami amankan dulu artefaknya," kata dia.

Novriadi menyitir Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2014 yang mengatur sejumlah hal, seperti penataan kawasan Kota Tua, sarana dan prasarana, serta lalu lintasnya. Dia berharap aturan tersebut bisa menjadi pedoman bagi pemilik dan pelaksana proyek.

Meski begitu, Novriadi juga menilai proyek jalan tol layang pelabuhan ini bisa memberi dampak positif dalam hal mengurangi beban jalan di dekat Museum Bahari. Selama ini banyak bangunan cagar budaya yang terkena dampak getaran kendaraan berat yang melintas di kawasan Kota Tua. "Mungkin dengan adanya tol itu bisa mengurangi," ujar dia.

Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya (Wika), Mahendra Vijaya, mengatakan belum bisa menjelaskan detail proyek yang akan digarap perusahaannya, termasuk dampak proyek bagi situs bersejarah di Kota Tua. "Wika akan selalu berkoordinasi dengan pemerintah dan pemberi kerja," kata dia. **GANGSAR PARIKESIT | INGE KLARA SAFITRI**

Proyek Jalan Tol Harbour II

Rute:

Tanjung Priok-Pluit

Interchange:

- Ramp Ancol Timur
- Ramp Pluit

Panjang proyek:

9,53 kilometer

Jumlah jalur:

2 x 3

Model struktur:

Elevated alias layang (*box girder* dan *double decker*)

Teknologi:

Sosrobahu (lengan jalan layang dibangun sejajar dengan jalan di bawahnya, kemudian diputar 90 derajat sehingga pembangunannya tidak mengganggu arus lalu lintas di jalanan di bawahnya).

Pemegang proyek:

PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP)

Investasi proyek:

Rp 13,5 triliun,

bersumber dari:

- Kas internal
- Pinjaman bank
- Penerbitan obligasi global

Skema proyek:

Turnkey project (pembayaran oleh pemilik proyek terhadap kontraktor dilakukan pada saat pekerjaan telah selesai seluruhnya atau pada saat serah-terima dari pelaksana ke pemilik proyek)

Kontraktor:

- PT Wijaya Karya (Wika)
- PT Girder Indonesia

Target selesai: 2022

● INGE KLARA | SUMBER DIOLAH

BPPT Jalan Tol Status Aman bagi Kota Tua

Judul	Proyek Jalan Tol Susun Pelabuhan Tunggu Persetujuan Rancang Bangun	Tanggal	Selasa, 15 oktober 2019
Media	Koran tempo Halaman 4		
Resume	Kepala Badan Pengatur jalan tol (BPJT) Danang Parikesit mengungkapkan bahwa proyek jalan tol Harbour Road II Tanjung Priok-Pluit masih menunggu persetujuan rancang bangun dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.		

JAKARTA - Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit mengungkapkan bahwa proyek jalan tol Harbour Road II Tanjung Priok-Pluit masih menunggu persetujuan rancang bangun dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Adapun desain dasar rencana pembangunan jalan tol susun layang tersebut, menurut Danang, sudah disetujui Kementerian. Saat ini, proyek jalan tol itu masih dalam tahap persiapan dokumen, perizinan konstruksi, serta penetapan lokasi berdasarkan right of way plan atau rencana daerah milik jalan tersebut.

"Acara kemarin itu sifatnya syukuran internal CMNP (Citra Marga Nusaphala Persada)," kata Danang kepada Tempo, kemarin.

PT CMNP merupakan pemilik proyek jalan tol susun layang tersebut. Peluncuran atau syukuran atas rencana proyek ini berlangsung pada 4 Oktober lalu.

Danang menambahkan, proyek jalan tol yang akan menggunakan model struktur elevated (layang) ini memerlukan ketelitian dan tingkat kehati-hatian yang tinggi. "Diskusi masih dilakukan, apalagi terkait dengan rancang bangun struktur melayang," katanya.

Jalan tol layang dengan rute Tanjung Priok-Pluit ini merupakan sambungan dari jalan tol dalam kota yang menjadi akses pendukung menuju wilayah Tanjung Priok-yang juga merupakan bagian dari jaringan jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR). Konstruksi jalan tol pelabuhan ini akan berada di atas jalan tol yang sudah ada (existing) di lintas Ancol hingga Pluit, yang merupakan bagian dari jalan tol Wiyoto Wiyono.

Pada 4 Oktober 2018, CMNP telah meneken berita acara dengan BPJT perihal perubahan rencana usaha pada pengusahaan ruas tol Wiyoto Wiyono. Masa konsesi CMNP atas jalan tol Wiyoto Wiyono-yang awalnya bakal berakhir pada 2025-berlanjut hingga 2060.

Jalan tol layang pelabuhan ini akan mempunyai dua simpang susun (interchange), yaitu interchange Ancol Timur dan interchange Pluit. Jalan tol layang ini akan memiliki enam lajur (dua jalur masing-masing terdiri atas tiga lajur) dengan model struktur bangunan yang menggunakan box girder dua jalur (double decker). Targetnya, proyek ini rampung pada 2022 mendatang.

Proyek Jalan Tol Susun Pelabuhan Tunggu Persetujuan Rancang Bangun

Proyek jalan tol itu juga masih dalam tahap perizinan konstruksi dan penetapan lokasi.

EDISI 15 OKTOBER 2019



Sejumlah kendaraan memasuki gerbang tol Ancol Timur, Jakarta. Dok TEMPO/Panca Syukasi

Judul	Pemindahan Ibu Kota Hapus Jawa Sentris	Tanggal	Selasa, 15 Oktober 2019
Media	Media Indonesia Halaman 5		
Resume	Menteri dalam negeri yang juga Pelaksana Tugas Menteri Hukum dan HAM Tjahjo Kumolo mengatakan, pemindahan ibu kota negara menjadi salah satu bentuk upaya pemerataan ekonomi dan menghapuskan istilah Jawa Sentris		

Pemindahan Ibu Kota Hapus Jawa Sentris

MENTERI Dalam Negeri yang juga Pelaksana Tugas Menteri Hukum dan HAM Tjahjo Kumolo mengatakan, pemindahan ibu kota negara menjadi salah satu bentuk upaya pemerataan ekonomi dan menghapuskan istilah Jawa sentris.

"Bapak Jokowi ingin menghapuskan istilah Jawa sentris dengan cara menggenjot kontribusi ekonomi dan percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia di seluruh wilayah negara kita," kata Tjahjo saat menghadiri Rapat Kerja Nasional Notaris tentang pemindahan ibu kota di Jakarta, kemarin.

Berdasarkan Survei Pendu-

duk Antar Sensus (Supas) 2015 menunjukkan 56,56% masyarakat Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu, di pulau lainnya, persentasenya kurang dari 10%, kecuali Pulau Sumatra. Dari data tersebut terlihat beban Pulau Jawa kian berat.

"Jika dilihat kontribusi ekonomi, dalam hal ini kontribusi ekonomi di pulau-pulau terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia atau domestik bruto sangat mendominasi Jawa, sedangkan pulau lainnya jauh tertinggal," katanya.

Kemudian, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), struktur ekonomi Indonesia

secara spasial pada 2018 didominasi kelompok provinsi di Jawa dan Sumatra. Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 58,48%, Sumatra sebesar 21,58%, dan Kalimantan 8,20%.

"Berdasarkan data BPS 2018 bahwa kontribusi ekonomi terhadap PDB Pulau Jawa itu hampir mencapai 60%. Di wilayah lain kontribusi tinggi, tapi pertumbuhan ekonomi masih di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi secara nasional," ucapnya.

Selain penghapusan Jawa sentris, Tjahjo menyebutkan, krisis air bersih di Pulau Jawa,

terutama Jabodetabek dan proporsi konsumsi lahan terbangun di Pulau Jawa yang mendominasi, bahkan mencapai lima kali lipat dari Kalimantan juga ikut menjadi pertimbangan pemindahan ibu kota.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menyatakan, pemindahan ibu kota ke Kalimantan paling lambat pada 2024. Sebelum itu, pemerintah akan menyiapkan lahan kemudian infrastruktur, dari *masterplan*, *urban design*, hingga dasar perundangan ibu kota pada 2020. (Ant/P-4)

Judul	Badan Usaha Lokal Minta Dilibatkan	Tanggal	Selasa, 15 Oktober 2019
Media	Bisnis Indonesia Halaman 7		
Resume	Hal itu terkait dengan terpilihnya kabupaten penajam pasar utara dan kabupaten kutai kartanegara di provinsi Kalimantan Timur menjadi lokasi Ibu kota negara yang baru.		

► PEMBANGUNAN IBU KOTA BARU

Badan Usaha Lokal Minta Dilibatkan

Bisnis, JAKARTA — Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) di Kalimantan Timur berharap adanya payung hukum untuk memberi kesempatan bagi pengusaha lokal dalam pembangunan ibu kota baru.

Krizia Putri K & Aprianus Doni T
redaksi@bisnis.com

Hal itu terkait dengan terpilihnya Kabupaten Penajam Pasar utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur menjadi lokasi ibu kota negara yang baru.

Heru Sucahyono, Ketua LPJK Kalimantan Timur, mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang mengusahakan adanya payung hukum berupa peraturan daerah (perda) atau bahkan peraturan presiden (perpres).

"Payung hukum ini yang melindungi keterlibatan perusahaan lokal, karena *kan* pasti pekerjaan ini [pembangunan ibu kota baru] kualitasnya besar dan artinya sesuai pengalaman juga pasti didominasi BUMN," tuturnya kepada *Bisnis*, Senin (14/10).

Menurut Heru, yang diharapkan oleh pengusaha daerah adalah pola kerja sama seperti perusahaan lokal menjadi subkontraktor untuk perusahaan-perusahaan yang nantinya membangun, sehingga pengusaha lokal ada pembagian terhadap pekerjaan tersebut dan hal itu akan lebih diperkuat dengan adanya payung hukum.

Jumlah anggota LPJK pada 2018 yang berada di Kaltim berjumlah 6.000 badan usaha, tetapi setelah dilakukan pendaftaran ulang hanya terdapat 2.400 badan usaha, karena kondisi pekerjaan yang menurun akibat dari melambatnya pertumbuhan ekonomi belakangan ini.

Namun, dengan terpilihnya

► Dengan terpilihnya Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota negara baru, jumlah perusahaan yang melakukan pendaftaran ulang meningkat menjadi 3.400 badan usaha dan kemungkinan bakal terus bertambah.

Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota negara baru, jumlah perusahaan yang melakukan pendaftaran ulang meningkat menjadi 3.400 badan usaha dan kemungkinan bakal terus bertambah.

"Sekarang saya lihat tren teman-teman ini mulai naik, saya harap dengan adanya payung hukum ini nantinya teman-teman daerah bisa menggarap pekerjaan di Kaltim, misalnya sektor perumahan bisa dikerjakan kontraktor-kontraktor daerah," papar Heru.

Sebagai informasi, pemerintah merencanakan skema pembiayaan pemindahan ibu kota terdiri dari APBN senilai Rp93,5 triliun, KPBU senilai Rp265,2 triliun, dan swasta senilai Rp127,3 triliun.

Beberapa proyek yang dibiayai APBN antara lain infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan istana negara, bangunan strategis TNI/Polri, rumah dinas ASN/TNI/Polri, pengadaan lahan, ruang terbuka hijau, dan pangkalan militer.

HARUS KOMPETEN

Pengamat Ekonomi Daerah Andreas Lako, mengatakan bahwa penyiapan ibu kota baru pasti akan membawa

multiplier effect ke banyak sektor dan daerah di luar kawasan. Salah satu sektor yang bisa melibatkan badan usaha lokal adalah proyek pembangunan infrastruktur.

"Perlu diperhatikan juga kemampuan dari badan usaha lokal tersebut. Jangan sampai pekerjaan yang seharusnya bisa cepat selesai jadi terlambat karena ketidakmampuan badan usaha lokal yang mengerjakannya. Bagaimanapun pembangunan ibu kota baru itu harus sesuai dengan target dan berkualitas,"ujarnya kepada *Bisnis*, Senin (14/10).

Menurutnya, keterlibatan korporasi lokal adalah sebuah keniscayaan. Pasalnya, korporasi besar dari luar Kalimantan pasti akan ada rencana bermitra dengan korporasi-korporasi lokal. Misalnya, kontraktor besar butuh pasokan material bahan bangunan dari badan usaha lokal.

Dia pun berharap *multiplier effect* di bidang perekonomian juga secara maksimal dimanfaatkan pemerintah. Tujuannya adalah agar target pemindahan ibu kota negara dengan salah satu visinya yakni pemerataan pembangunan dan ekonomi yang menyeluruh ke semua wilayah, dapat tercapai sejak awal pembangunannya.

Sementara itu, Pelaksana tugas Menteri Hukum dan HAM yang juga Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemindahan Ibu Kota Negara menjadi salah satu bentuk upaya pemerataan ekonomi serta menghapuskan istilah Jawa sentris.

"Jika dilihat kontribusi ekonomi dalam hal ini kontribusi ekonomi di pulau-pulau terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia atau domestik bruto sangat mendominasi Jawa, sementara pulau lainnya jauh tertinggal," katanya seperti dikutip melalui Antara *Senin* (14/10). ■

Judul	Rajin Blusukan seperti Presiden	Tanggal	Selasa, 15 Oktober 2019
Media	Republika Halaman 8		
Resume	Ketika Mau menerima atau ditunjuk sebagai pembantu presiden, jangan pakai visi-misi siapa pun kecuali visi-misi presiden		

Rajin Blusukan Seperti Presiden

● NOVITA INTAN

Ketika mau menerima atau ditunjuk sebagai pembantu presiden, jangan pakai visi-misi siapa pun kecuali visi-misi presiden.

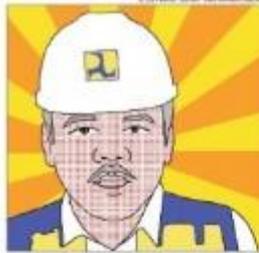
Mentri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljoto memang bukan orang baru di lingkungan Pekerjaan Umum. Baginya, ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk bergabung dalam Kabinet Kerja bukan pekerjaan sulit. Ritme kerja Jokowi yang tak tentu, serta energi yang dibutuhkan untuk

memiliki bukan hal asing bagi Basuki.

Sejak kelahiran 5 November 1954 ini sudah sejak 1980 bekerja di lingkungan Pekerjaan Umum. Kiprahnya dimulai dari Kota Semarang. Kepada Republika, Basuki menceritakan, motifasinya selama melantasi di Pekerjaan Umum sangat tinggi. Basuki bisa sangat cepat beradaptasi mengikuti pekerjaan pemerintahan umum sekaligus mengetesnya. Bahkan, jam kerjanya bisa 24 jam sehari.

Seperti Jokowi, Basuki juga sering blusukan. Bahkan, ia mengaku terkadang lupa bahwa sebelum ini dirinya adalah salah satu menteri di Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla. "Jadi, buat saya, pekerjaan ini kadangkala lupa bahwa saya menteri karena sibuk (demi) di sini. Saya juga lupa kadang harus memutuskan (keputusan), itu ternyata saya harus bisa memutuskan," tuturnya sembari tertawa.

Lulusan Teknik Geologi UGM ini memutarakan, sudah 15 tahun menjadi bagian dari pejabat eselon I Kementerian PUPR. Sejumlah jabatan sudah dilakukannya sebelum dipromosikan Jokowi memimpin kementerian yang bertanggung jawab terhadap infrastruktur di



Indonesia.

Di lingkup kabinet, hubungan Presiden Jokowi dengan Basuki bukan sekadar urusan kerja. Bahkan, saling nonformalnya, keduanya tidak perlu menggelar pertemuan khusus untuk membahas sesuatu. Basuki menganggap bekerja dengan Presiden Jokowi sebagai orang yang memiliki pemikiran terbuka dan sikap yang seringnya nonformal. Setiap blusukan ke lapangan, Menteri PUPR tak perlu meminta waktu khusus bertemu di Istana Presiden. "Selama lima tahun tidak pernah sekalipun (minut) waktu jika ada masalah. Jadi, karena sering ke lapangan, biasanya beliau telepon (jika ada masalah)," ujarnya.

Suami dari Kartika Nuraini ini selalu mengingat Jokowi adalah sosok yang sangat terbuka dan nyaman diajak diskusi. Ia membeberikan gaya kepemimpinan Jokowi dengan sosok lain sebagai halangan loyalitas. Jokowi

memberikan kepercayaan kepada para kadernya. Berikut ini, dan Basuki memberikan loyalitasnya sebagai pembantu Presiden.

"Saya pribadi sangat nyaman bekerja membantu beliau. Kalau, walaupun beliau itu orangnya tidak formal atau nonformal tapi sangat arif, terutama target-target pekerjaannya yang sudah dibarengi kepada pembantuannya. Jadi, fokus bekerja sudah fokus dan dengan target," ujarnya.

Pada hal, sudah bisa dilihat sebagai peran Jokowi dalam pembangunan infrastruktur nasional. Namun, bagi Basuki, masih ada program-program yang belum tercapai sepenuhnya. Misalnya, terkait permasalahan rakyat, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain itu, target sanitasi dan pengendalian banjir yang belum tuntas sepenuhnya. Di penghujung akhir periode Kabinet Kerja Jilid I, Basuki secara terbuka mengkritik program-program tersebut memang masih sulit tercapai.

Alasannya karena pada 2014 pemerintah hanya mampu melokasi air sepenuhnya untuk masyarakat atas sebesar 100 persen. Padahal, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla harus memulainya dari cakupan 60 persen. Artinya, masih banyak sekali interval serta membutuhkan waktu sangat besar. Di sisi lain, pengendalian banjir dan sanitasi belum juga dapat diselesaikan karena masalah Ciliwung-Cisadane belum selesai. Sebab, pemerintah masih berurusan dengan masalah pembebasan lahan.

Kritikan

Meskipun ada target yang belum bisa tercapai, Basuki mengakui tak pernah ingin membanggakan capaian-capaian sebagai menteri PUPR di Kabinet Kerja Jilid I. Baginya, pekerjaan pembangunan tidak akan pernah habis, dan tidak pernah sempat untuk dibanggakan, ia mengabdikan dalam pembangunan sebuah jalan. Begitu selesai membangun jalan, selanjutnya dilakukakan perawatan, setelah itu diperpanjang lagi.

Prinsipnya, bagi ayah tiga anak ini, fokus dalam bekerja adalah kunci. Kunci untuk meraih target, kunci untuk tidak membebani banyaknya kritikan atas kerjanya, serta kunci untuk menyelesaikan pembangunan nasional. "Sehingga nanti masyarakat dapat menilai sendiri," kata dia.

Basuki tak takut dengan kritikan atau komentar pedas dari masyarakat, terutama mereka yang berambisi untuk dilantik akan-sikunannya menilai sosial. Sosok yang juga satu ultimatum dengan Presiden Jokowi ini menilai sangat wajar masyarakat memiliki pandangan berbeda dengan pejabat publik atau pemerintah. Kritikan kerap menghantu pejabat-pejabat. Namun, bagi Basuki, selama ia masih berada dalam jalur target pembangunan, infrastruktur, tidak peduli omongan orang.

Gerak Maju Infrastruktur

● GLEH NOVITA INTAN

Bagaimana dengan pendapat di luar pembangunan itu pemborosan anggaran?

Orang memiliki persepsi yang berbeda, mungkin punya pendapatnya membongkar infrastruktur itu hanya pemborosan. Padahal pembangunan infrastruktur menurut pemerintah sekarang menjadi fondasi kita bernegara. Kenapa investasi kita melambat? Karena salah satunya karena ketersediaan infrastruktur kita yang masih kurang. Jadi, ini hanya persepsi saja, tapi faktanya dibangun ada Tol Trans-Jawa sudah mengubah perilaku masyarakat maupun bisnis.

Saat ini, orang bisa kuliner dari Semarang ke Solo, lalu bongkar muatnya barang Jakarta dibongkar di Semarang karena bisa diangkut di tol

dan lebih murah sekarang. Kemudian, para petani mangga di Pasuruan menjual mangga di Jakarta agar lebih fresh sudah dihitung berapa jam delivery. Jadi, menurut saya, komunikasi yang kurang baik, sehingga masyarakat belum mendapatkan informasi mengenai pentingnya pembangunan infrastruktur ini.

Apakah ingin Anda ceritakan ke kolega saat menjadi menteri di Kabinet Kerja?

Menteri merupakan amanah, kepercayaan, dan pemertuaan presiden, jadi harus tegak lurus kepada presiden, jangan punya agenda lain, apakah itu dari partai politik atau profesional. Ketika mau menerima atau ditunjuk sebagai pembantu presiden, jangan pakai visi-misi siapa pun kecuali visi-misi presiden. Itu saja! Maka

kerja lebih enak. Hal itu yang saya lakukan, kalau saya ditanya saya tidak punya visi karena visi saya melaksanakan visi presiden.

Anda ingin dikomentari sebagai menteri yang seperti apa?

Pertanyaan susah ini. Makanan samarnya saya senang liwat oke, pecat oke! Jadi, semuanya menyenangkan untuk saya. Kerja menyenangkan, saham adalah anak dan istri tahu kakakan saya jadi mereka tidak pernah bilang kapan ping dan kapan pulang. Satu Minggu ya, juga kerja, dari dulu saya kerja seperti ini dan tidak ada yang berubah. Dulu waktu saya mengambil rapor anak saya, ditelpon di jalan, saya langsung ke kantor.

● 15/10/2019

● 15/10/2019

Judul	DKI siapkan Tiga Program Perbaikan sanitasi	Tanggal	Selasa, 15 Oktober 2019
Media	Bisnis Indonesia Halaman 9		
Resume	Pemprov DKI Jakarta dan PD Perusahaan Air Limbah DKI Jakarta (PD Pal Jay) menyiapkan tiga program Perbaikan sanitasi bagi warga Ibu kota.		

► PELAYANAN UMUM

DKI Siapkan Tiga Program Perbaikan Sanitasi

Bisnis, JAKARTA — Pemprov DKI Jakarta dan PD Perusahaan Air Limbah DKI Jakarta (PD Pal Jaya) menyiapkan tiga program perbaikan sanitasi bagi warga ibu kota.

Direktur PD Pal Jaya Subekti mengatakan program tersebut difokuskan untuk membangun dan memperbaiki sistem pengolahan air limbah setempat atau *on site* yang ada di kawasan padat penduduk.

Ada tiga program tersebut, yaitu revitalisasi tangki septik [*septic tank*], pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal, dan bank penampung (*interceptor*).

"Tiga program ini akan diumumkan secara resmi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam waku dekat," ujarnya ketika ditemui *Bisnis* di kantornya, Jumat (11/10).

Dia menjelaskan, ada mata rantai pengolahan air limbah secara *on site*, yakni dimulai dari pewadahan (*container*), pengosongan dan penyedotan, pengolahan, dan pembuangan. Menurutnya, saat ini masih banyak warga DKI Jakarta yang belum memiliki fasilitas pembuangan atau tangki septik ideal.

Pasalnya, tangki septik yang dibangun warga kebanyakan rembes sehingga air limbah terserap ke dalam tanah. Subekti menilai hal tersebut bisa berbahaya lantaran sumur air bersih dapat tercemar bakteri *e-coli*.

Oleh karena itu, PD Pal Jaya menawarkan fasilitas tangki septik anti rembes yang terbuat dari lapisan *fiber*.

"Kami sudah membuat produk tangki septik *fiber* yang diberi nama Biopal. Namun,

jika warga ingin membangun dengan material atau merek lain ya bisa," imbuhnya.

Kedua, Pemprov DKI melalui Dinas Tata Air juga menawarkan pembangunan IPAL komunal. Dia menegaskan program revitalisasi tangki berbeda dengan pembangunan septic tank komunal. Pasalnya, revitalisasi tangki septik hanya berlaku untuk masing-masing rumah.

"[*Septic tank*] Komunal ini biasanya sudah instalasi pengolahan air limbah [IPAL]. Kalau sudah IPAL ada listrik, aerasi media, dan bakteri *aerobic* dan *anaerobic*. Jadi [istilah] yang pas bukan *septic tank* komunal, tetapi IPAL komunal."

Secara garis besar, IPAL komunal akan mengolah limbah yang dikumpulkan dari 5–10 rumah warga. Konsep tersebut menjadi solusi lantaran tidak

semua warga di DKI Jakarta memiliki sistem pembuangan limbah yang baik.

Menurutnya, mahal tidaknya biaya untuk membangun IPAL komunal tergantung dengan spesifikasi yang diharapkan. Dia menjelaskan, biaya untuk bahan baku, yaitu bak yang terbuat dari *fiber* sudah cukup mahal.

Selain itu, masyarakat juga harus menghitung biaya konstruksi sipil yang dibutuhkan untuk membangun IPAL komunal. Apalagi, pembangunan pipa air kotor berbeda dengan pipa air minum.

"Jika ingin IPAL komunal yang lebih canggih, *cost* [pembangunan] pasti lebih mahal. Konstruksi beda di kebun [tanah kosong] beda dengan di jalan. Kalau di jalan harus bongkar dan memperkuat struktur sipil. Jadi gak bisa langsung bilang

mahal atau murah, lihat dulu sistemnya," imbuhnya.

Idealnya, lanjut Subekti, pembangunan IPAL komunal membutuhkan lahan yang cukup luas. Sebagai perbandingan, jarak antara tangki septik dengan sumber air minimal 10 meter. Jarak tersebut menjadi syarat agar sumber air bersih tidak tercemar bakteri *e-coli* yang berasal dari tinja.

Oleh karena itu, warga harus menyediakan lahan yang akan digunakan untuk membangun IPAL komunal. Menurutnya, persoalan lahan menjadi permasalahan yang paling pelik dibandingkan pembangunan konstruksi fisik sistem pengolahan limbah sistem setempat atau *on site*.

"Ketika sudah terkumpul 5-10 rumah kan [kebutuhan lahan] jadi besar. Kalau begini ya kendala

lahannya ada enggak? Sebenarnya enggak simpel juga [IPAL komunal], uang sudah dianggarkan pun belum tentu bisa eksekusi di lapangan," ucapnya.

Oleh karena itu, Subekti akan berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air DKI dan pengelola wilayah untuk memberikan edukasi terkait dengan pengolahan air limbah kepada masyarakat.

Terakhir, Pemprov DKI akan memfasilitasi warga untuk membangun *interceptor* sebagai pengganti saluran pembuangan. *Interceptor* dapat diterapkan apabila warga tidak memiliki lahan yang cukup luas untuk membangun IPAL komunal.

"Dengan adanya tiga program ini, warga diharapkan tak lagi membuang limbah BAB ke sungai atau kali," kata Subekti. (Aziz Rahardyan/Feni Freycinetia)

Judul	Bantuan Air dilakukan Sampai Hujan Turun	Tanggal	Selasa, 15 Oktober 2019
Media	Republika Halaman 22		
Resume	Pemerintah kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat, memastikan pendistribusian air bersih kepada warga berdampak kekeringan akan terus berjalan selama mereka masih membutuhkannya air. Sekretaris daerah (sekda) kabupaten, Bekasi, Uju mengaku telah menginstruksikan kepada badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, PDAM Tirta Bhagasasi.		

Bantuan Air Dilakukan Sampai Hujan Turun

CIKARANG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat, memastikan pendistribusian air bersih kepada warga terdampak kekeringan akan terus berjalan selama mereka masih membutuhkan air. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Uju, mengaku telah menginstruksikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, PDAM Tirta Bhagasasi, serta Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bekasi untuk memastikan warga tetap mendapatkan air bersih.

"Tidak ada penghentian distribusi air bersih kecuali masyarakat sudah tidak membutuhkan air bersih lagi atau sudah memasuki musim hujan," kata Uju saat ditemui di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Senin (14/10).

Uju mengaku semua institusi terkait sudah diperintahkan untuk bahu-membahu memasok air bagi warga yang membutuhkan. Dia mengatakan, musim kemarau tahun ini berlangsung lebih lama dan meluas hingga hampir merata terjadi di 23 kecamatan Kabupaten Bekasi. "Kami telah menugaskan kepada BPBD, PDAM, bahkan PMI, serta pihak swasta ikut mendistribusikan air bersih kepada warga," ucapnya.

Menurut Uju, Pemkab Bekasi sudah merencanakan akan menggelar shalat istisqa' di malam waktu

dekat ini agar Sang Pencipta menurunkan hujan. Dia merasa solusi satu-satunya mengatasi kekeringan adalah apabila hujan turun. "Kondisi alam seperti ini, jangan di Kabupaten Bekasi, di daerah lain saja kekeringannya sudah meluas," kata Uju.

Berdasarkan data terbaru BPBD Kabupaten Bekasi, pendistribusian air bersih kepada warga terdampak kekeringan telah dilakukan di tujuh kecamatan dan 17 desa yang tersebar di 61 titik. Operator Data Informasi Pustalops BPBD Kabupaten Bekasi, Mega, mengatakan, bantuan yang diberikan masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat.

"Distribusi air bersih diberikan kepada 7.905 kepala keluarga yang disalurkan BPBD Kabupaten Bekasi, PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi, PMI Kabupaten Bekasi, Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, personel polsek, serta Aksi Cepat Tanggap (ACT), dan perusahaan swasta," kata Mega.

Menurut Mega, hingga saat ini total pendistribusian air bersih sudah mencapai 428 ribu liter. Air bersih itu berasal dari BPBD Kabupaten Bekasi 285 ribu liter, ACT sebanyak 88 ribu liter, PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi 38 ribu liter, Polsek Cibarusah 12 ribu liter, dan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi 5.000 liter. "Beberapa kecamatan yang sering me-

ngusulkan pemberian jatah air bersih berada di Kecamatan Cibarusah, Serangbaru, Cikarang Timur, Cikarang Pusat, Muaragembong, Bojongmangu, dan Cikarang Utara," ucapnya.

Asisten Daerah III Kabupaten Bekasi, Suhup, menambahkan, pihaknya berusaha mencari solusi permanen bagi masyarakat yang terdampak kekeringan. Pihaknya akan membagi solusi menjadi tiga, yaitu jangka pendek, menengah, dan panjang. "Program jangka pendek, kami telah melakukan pengiriman air kepada masyarakat terdampak kekeringan. Jangka menengah, penyambungan pipa PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi. Jangka panjangnya, kami akan bangun waduk di sekitar masyarakat yang selalu terdampak kekeringan. Akan kami bangun embung air," katanya.

Suhup mengatakan, kondisi alam beberapa wilayah yang kerap terdampak kekeringan memang tandus dengan tanah berbatu sehingga pengeboran air tanah di kedalaman 60 meter belum juga menemukan mata air. Hal itu karena di dalam tanah banyak ditemukan lapisan bebatuan keras. "Kontur tanahnya memang harus kami periksa betul karena hingga kedalaman 60 meter belum mendapatkan air," kata Suhup. ■ antara.com/erik.purnama.putra



PROGRES LRT Pekerja berdiri di tiang konstruksi LRT Jabodebek yang akan disambung di atas Perempatan Mampang, Jakarta Selatan, Senin [14/10]. Progres pembangunan LRT Jabodebek tahap I sampai 4 Oktober 2019, mencapai 66,13 persen. Rinciannya, rute Cawang-Cibubur rampung 85,7 persen, Cawang-Dukuh Atas 56,1 persen, dan Cawang-Bekasi Timur 59,5 persen.